



WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 187);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU
dan
WALI KOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
6. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
7. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggararan lebih tahun pelaporan yang terdiri saldo anggaran lebih awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan saldo anggaran lebih akhir.
8. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
9. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

10. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
11. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit LO, koreksi dan ekuitas akhir.
12. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 berupa Laporan keuangan, yang meliputi:
 - a. LRA;
 - b. LPSAL;
 - c. LO;
 - d. LPE;
 - e. Neraca;
 - f. LAK; dan
 - g. CaLK.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.

Pasal 3

- (1) Rincian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Lampiran I yang memuat LRA terdiri atas:
 1. ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
 2. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 3. rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan

4. rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dari sub kegiatan;
- b. Lampiran II yang memuat LPSAL;
- c. Lampiran III yang memuat LO;
- d. Lampiran IV yang memuat LPE;
- e. Lampiran V yang memuat Neraca;
- f. Lampiran VI yang memuat LAK;
- g. Lampiran VII yang memuat CaLK;
- h. Lampiran VIII yang memuat daftar rekapitulasi piutang Daerah;
- i. Lampiran IX yang memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X yang memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI yang memuat daftar penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII yang memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII yang memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV yang memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV yang memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI yang memuat daftar dana cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII yang memuat daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII yang memuat daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX yang memuat daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX yang memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah terdiri atas:
 1. Ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik Daerah; dan
 2. Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik Daerah.

Pasal 4

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

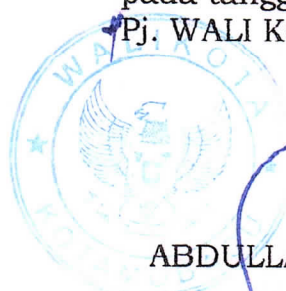
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu

pada tanggal 09 SEPTEMBER 2024

Pj. WALI KOTA KOTAMOBAGU,



(Handwritten signature in blue ink)

ABDULLAH MOKOGINTA

Diundangkan di Kotamobagu

pada tanggal 09 SEPTEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,



SOFYAN MOKOGINTA

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI
UTARA : NOMOR 3/W.III/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan *Peraturan Daerah* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yaitu kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bahwa laporan keuangan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.



PEMERINTAH KOTA PEMERINTAH KOTAMOBAGU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2023
periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
SKPD : 5-02.0-00.0-00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.01.000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.01.000.001 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN DAERAH	501.146.897.671,00	0,00	503.013.123.038,51	503.013.123.038,51	1.866.225.367,51
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.796.031.406,00	0,00	2.720.884.547,51	2.720.884.547,51	924.853.141,51
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.796.031.406,00	0,00	1.796.031.406,00	1.796.031.406,00	0,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	1.796.031.406,00	0,00	1.796.031.406,00	1.796.031.406,00	0,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.796.031.406,00	0,00	1.796.031.406,00	1.796.031.406,00	0,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.796.031.406,00	0,00	1.796.031.406,00	1.796.031.406,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	924.853.141,51	924.853.141,51	924.853.141,51
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	45.491.028,00	45.491.028,00	45.491.028,00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0,00	0,00	45.491.028,00	45.491.028,00	45.491.028,00
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0,00	0,00	45.491.028,00	45.491.028,00	45.491.028,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	659.089.222,61	659.089.222,61	659.089.222,61
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	659.089.222,61	659.089.222,61	659.089.222,61
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	659.089.222,61	659.089.222,61	659.089.222,61
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	0,00	30.115.726,90	30.115.726,90	30.115.726,90
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	0,00	196.761,90	196.761,90	196.761,90
4.1.04.12.07.0006	Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya	0,00	0,00	196.761,90	196.761,90	196.761,90
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	0,00	29.678.965,00	29.678.965,00	29.678.965,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	0,00	0,00	29.678.965,00	29.678.965,00	29.678.965,00
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00	122.715.724,00	122.715.724,00	122.715.724,00
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	122.715.724,00	122.715.724,00	122.715.724,00
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	122.715.724,00	122.715.724,00	122.715.724,00
4.1.04.23	Remunerasi	0,00	0,00	67.441.440,00	67.441.440,00	67.441.440,00
4.1.04.23.01	Remunerasi	0,00	0,00	67.441.440,00	67.441.440,00	67.441.440,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.1.04.23.01.0001	1Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00	67.441.440,00	67.441.440,00	67.441.440,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	494.527.418.265,00	0,00	495.999.027.679,00	495.999.027.679,00	1.471.609.414,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	464.757.700.030,00	0,00	466.339.105.409,00	466.339.105.409,00	1.581.405.379,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	445.940.861.030,00	0,00	447.522.266.409,00	447.522.266.409,00	1.581.405.379,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	13.511.895.532,00	0,00	14.823.231.515,00	14.823.231.515,00	1.311.335.983,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	793.094.000,00	0,00	1.332.499.367,00	1.332.499.367,00	539.405.367,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	7.163.103.532,00	0,00	5.400.615.517,00	5.400.615.517,00	(1.762.488.015,00)
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	0,00	0,00	1.002.057.550,00	1.002.057.550,00	1.002.057.550,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	526.487.000,00	0,00	668.003.157,00	668.003.157,00	141.516.157,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	3.789.396.000,00	0,00	18.389.426,00	18.389.426,00	(3.771.006.574,00)
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	0,00	4.955.679.171,00	4.955.679.171,00	4.955.679.171,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	6.681.000,00	0,00	1.100.116,00	1.100.116,00	(5.580.884,00)
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.233.134.000,00	0,00	1.444.887.211,00	1.444.887.211,00	211.753.211,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	368.404.885.000,00	0,00	370.215.030.450,00	370.215.030.450,00	1.810.145.450,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	368.404.885.000,00	0,00	370.215.030.450,00	370.215.030.450,00	1.810.145.450,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	10.733.523.000,00	0,00	10.546.566.350,00	10.546.566.350,00	(186.956.650,00)
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	765.111.000,00	0,00	764.797.000,00	764.797.000,00	(314.000,00)
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.323.960.000,00	0,00	1.323.405.000,00	1.323.405.000,00	(555.000,00)
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.375.026.000,00	0,00	2.375.026.000,00	2.375.026.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0057	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	5.441.815.000,00	0,00	5.413.287.050,00	5.413.287.050,00	(28.527.950,00)
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	827.611.000,00	0,00	670.051.300,00	670.051.300,00	(157.559.700,00)
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	53.290.557.498,00	0,00	51.937.438.094,00	51.937.438.094,00	(1.353.119.404,00)
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	14.650.190.331,00	0,00	14.652.983.312,00	14.652.983.312,00	2.792.981,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.002.500.000,00	0,00	1.002.500.000,00	1.002.500.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	24.132.059.000,00	0,00	23.334.134.015,00	23.334.134.015,00	(797.924.985,00)
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	381.000.000,00	0,00	435.500.000,00	435.500.000,00	54.500.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.496.160.000,00	0,00	1.455.520.000,00	1.455.520.000,00	(40.640.000,00)
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	605.960.000,00	0,00	605.960.000,00	605.960.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4.135.250.670,00	0,00	7.405.289.270,00	7.405.289.270,00	3.270.038.600,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	402.648.000,00	0,00	0,00	0,00	(402.648.000,00)
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	3.439.238.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.439.238.000,00)
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.653.924.438,00	0,00	1.653.924.438,00	1.653.924.438,00	0,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	399.572.300,00	0,00	399.572.300,00	399.572.300,00	0,00
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	572.845.309,00	0,00	572.845.309,00	572.845.309,00	0,00
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	419.209.450,00	0,00	419.209.450,00	419.209.450,00	0,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	5.807.022.000,00	0,00	5.807.022.000,00	5.807.022.000,00	0,00
4.2.01.02.01	DID	5.807.022.000,00	0,00	5.807.022.000,00	5.807.022.000,00	0,00
4.2.01.02.01.0001	DID	5.807.022.000,00	0,00	5.807.022.000,00	5.807.022.000,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	13.009.817.000,00	0,00	13.009.817.000,00	13.009.817.000,00	0,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	13.009.817.000,00	0,00	13.009.817.000,00	13.009.817.000,00	0,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	13.009.817.000,00	0,00	13.009.817.000,00	13.009.817.000,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.769.718.235,00	0,00	29.659.922.270,00	29.659.922.270,00	(109.795.965,00)
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	29.769.718.235,00	0,00	29.659.922.270,00	29.659.922.270,00	(109.795.965,00)
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	29.769.718.235,00	0,00	29.659.922.270,00	29.659.922.270,00	(109.795.965,00)
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	6.577.668.476,00	0,00	7.010.609.279,17	7.010.609.279,17	432.940.803,17
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.592.241.417,00	0,00	4.137.813.560,02	4.137.813.560,02	(1.454.427.856,98)
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.363.865.773,00	0,00	11.864.927.407,49	11.864.927.407,49	1.501.061.634,49
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	100.448.219,00	0,00	96.512.728,32	96.512.728,32	(3.935.490,68)
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.135.494.350,00	0,00	6.550.059.295,00	6.550.059.295,00	(585.435.055,00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.823.448.000,00	0,00	4.293.210.812,00	4.293.210.812,00	(530.237.188,00)
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.823.448.000,00	0,00	4.293.210.812,00	4.293.210.812,00	(530.237.188,00)
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.823.448.000,00	0,00	4.293.210.812,00	4.293.210.812,00	(530.237.188,00)
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.823.448.000,00	0,00	4.293.210.812,00	4.293.210.812,00	(530.237.188,00)
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.823.448.000,00	0,00	4.293.210.812,00	4.293.210.812,00	(530.237.188,00)
5	BELANJA DAERAH	37.212.321.900,00	0,00	36.702.204.775,00	36.702.204.775,00	(510.117.125,00)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(500.000.000,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(500.000.000,00)
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(500.000.000,00)
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(500.000.000,00)
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(500.000.000,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	36.712.321.900,00	0,00	36.702.204.775,00	36.702.204.775,00	(10.117.125,00)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	652.447.500,00	0,00	642.330.375,00	642.330.375,00	(10.117.125,00)
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	168.934.900,00	0,00	166.424.625,00	166.424.625,00	(2.510.275,00)
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	168.934.900,00	0,00	166.424.625,00	166.424.625,00	(2.510.275,00)
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	168.934.900,00	0,00	166.424.625,00	166.424.625,00	(2.510.275,00)
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	483.512.600,00	0,00	475.905.750,00	475.905.750,00	(7.606.850,00)
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	483.512.600,00	0,00	475.905.750,00	475.905.750,00	(7.606.850,00)
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	483.512.600,00	0,00	475.905.750,00	475.905.750,00	(7.606.850,00)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	36.059.874.400,00	0,00	36.059.874.400,00	36.059.874.400,00	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	36.059.874.400,00	0,00	36.059.874.400,00	36.059.874.400,00	0,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	36.059.874.400,00	0,00	36.059.874.400,00	36.059.874.400,00	0,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	13.009.817.000,00	0,00	13.009.817.000,00	13.009.817.000,00	0,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	23.050.057.400,00	0,00	23.050.057.400,00	23.050.057.400,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT	463.934.575.771,00	0,00	466.310.918.263,51	466.310.918.263,51	2.376.342.492,51
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	40.518.616.961,00	0,00	40.520.279.903,81	40.520.279.903,81	1.662.942,81
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.518.616.961,00	0,00	40.520.279.903,81	40.520.279.903,81	1.662.942,81
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	0,00	10.372.106,00	10.372.106,00	10.372.106,00
6.1.01.01.02	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	0,00	0,00	10.372.000,00	10.372.000,00	10.372.000,00
6.1.01.01.02.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	10.372.000,00	10.372.000,00	10.372.000,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	106,00	106,00	106,00
6.1.01.01.04.0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro	0,00	0,00	106,00	106,00	106,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	40.518.616.961,00	0,00	32.011.895.989,81	32.011.895.989,81	(8.506.720.971,19)
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	40.518.616.961,00	0,00	32.011.895.989,81	32.011.895.989,81	(8.506.720.971,19)
6.1.01.02.01.0012	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	0,00	0,00	74.508.424,00	74.508.424,00	74.508.424,00
6.1.01.02.01.0014	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum	40.518.616.961,00	0,00	30.096.691.243,81	30.096.691.243,81	(10.421.925.717,19)
6.1.01.02.01.0018	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-PAUD	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
6.1.01.02.01.0019	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD	0,00	0,00	4.499.450,00	4.499.450,00	4.499.450,00
6.1.01.02.01.0020	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP	0,00	0,00	2.850.450,00	2.850.450,00	2.850.450,00
6.1.01.02.01.0032	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	148.316.250,00	148.316.250,00	148.316.250,00
6.1.01.02.01.0051	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan- Reguler-Jalan	0,00	0,00	505.596.844,00	505.596.844,00	505.596.844,00
6.1.01.02.01.0056	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum- Penugasan	0,00	0,00	359.445,00	359.445,00	359.445,00
6.1.01.02.01.0059	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sanitasi- Penugasan	0,00	0,00	6.145.800,00	6.145.800,00	6.145.800,00
6.1.01.02.01.0071	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	294.837.700,00	294.837.700,00	294.837.700,00
6.1.01.02.01.0072	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6.1.01.02.01.0074	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	0,00	0,00	11.820.000,00	11.820.000,00	11.820.000,00
6.1.01.02.01.0078	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	0,00	0,00	292.272.330,00	292.272.330,00	292.272.330,00
6.1.01.02.01.0082	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB- Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	0,00	0,00	527.269.562,00	527.269.562,00	527.269.562,00
6.1.01.02.01.0083	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)	0,00	0,00	1.160.550,00	1.160.550,00	1.160.550,00
6.1.01.02.01.0100	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
6.1.01.02.01.0101	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	17.827.700,00	17.827.700,00	17.827.700,00
6.1.01.02.01.0103	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	25.154.691,00	25.154.691,00	25.154.691,00
6.1.01.02.01.0104	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	85.550,00	85.550,00	85.550,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0,00	0,00	8.496.348.866,00	8.496.348.866,00	8.496.348.866,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	0,00	8.484.699.197,00	8.484.699.197,00	8.484.699.197,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	0,00	8.484.699.197,00	8.484.699.197,00	8.484.699.197,00
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	0,00	0,00	11.649.669,00	11.649.669,00	11.649.669,00
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	0,00	0,00	11.649.669,00	11.649.669,00	11.649.669,00
6.1.01.99	Koreksi SiLPA	0,00	0,00	1.662.942,00	1.662.942,00	1.662.942,00
6.1.01.99.01	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	1.662.942,00	1.662.942,00	1.662.942,00
6.1.01.99.01.0001	Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	1.662.942,00	1.662.942,00	1.662.942,00
6.1.01.99.02	Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.99.02.0001	Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	40.518.616.961,00	0,00	40.520.279.903,81	40.520.279.903,81	1.662.942,81
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	504.453.192.732,00	0,00	506.831.198.167,32	506.831.198.167,32	2.378.005.435,32

